



BUPATI CILACAP  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI CILACAP  
NOMOR 123 TAHUN 2020

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN CILACAP TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor Tahun 2020 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2019, maka dipandang perlu membuat Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2019;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6279);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah di Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2010 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 57) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah di Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 167);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 20 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 20);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2019 Nomor 7);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN ANGGARAN 2019.**

**Pasal 1**

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2019 terdiri atas:

1.	Pendapatan :		
	a. Pendapatan Asli Daerah	Rp.	574.276.795.303,59
	b. Dana Perimbangan	Rp.	1.928.670.863.364,00
	c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	Rp.	779.850.307.643,00
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>Rp.</b>	<b>3.282.797.966.310,59</b>

2.	Belanja :		
	a.	Belanja Tidak Langsung	
		1) Belanja Pegawai	Rp. 1.193.017.590.225,00
		2) Belanja Subsidi	Rp. 400.000.000,00
		3) Belanja Hibah	Rp. 58.596.950.000,00
		4) Belanja Bantuan Sosial	Rp. 5.884.050.000,00
		5) Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintah Desa	Rp. 22.943.846.000,00
		6) Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota Dan Pemerintah Desa	Rp. 480.636.985.175,00
		7) Belanja Tidak Terduga	Rp. 0,00
		Jumlah	Rp. 1.761.479.421.400,00
	b.	Belanja Langsung	
		1) Belanja Pegawai	Rp. 201.926.667.932,00
		2) Belanja Barang dan Jasa	Rp. 656.593.850.548,00
		3) Belanja Modal	Rp. 663.321.198.006,20
		Jumlah	Rp. 1.521.841.716.486,20
		Jumlah Belanja	Rp. 3.283.321.137.886,20
		Defisit	(Rp. 523.171.575,61)
3.	Pembiayaan :		
	a.	Penerimaan	Rp. 302.164.117.632,93
	b.	Pengeluaran	Rp. 20.775.000.000,00
		Jumlah Pembiayaan Netto	Rp. 281.389.117.632,93
		Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp. 280.865.946.057,32

Pasal 2

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran.

Pasal 4

Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap  
pada tanggal 11 AUG 2020

BUPATI CILACAP,

  
TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap  
pada tanggal 11 AUG 2020

  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN CILACAP,

FARID MA'RUF

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2020 NOMOR 123



**PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP**  
**RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
 TAHUN ANGGARAN 2019

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN</b>					
1.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	3.289.004.349.418,00	3.282.797.966.310,59	(6.206.383.107,41)	99,81	
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	553.906.636.361,00	574.276.795.303,59	20.370.158.942,59	103,68	
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	193.950.000.000,00	209.475.848.896,00	15.525.848.896,00	108,01	
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	44.031.704.500,00	44.740.277.398,00	708.572.898,00	101,61	
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	26.091.626.400,00	26.190.072.040,00	98.445.640,00	100,38	
1.2	<b>DANA PERIMBANGAN</b>	289.833.305.461,00	293.870.596.969,59	4.037.291.508,59	101,39	
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	1.977.669.813.257,00	1.928.670.863.364,00	(48.998.949.893,00)	97,52	
1.2.2	Dana Alokasi Umum	76.300.309.685,00	61.674.609.822,00	(14.625.699.863,00)	80,83	
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	1.415.501.977.000,00	1.423.200.397.000,00	7.698.420.000,00	100,54	
1.3	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	485.867.526.572,00	443.795.856.542,00	(42.071.670.030,00)	91,34	
1.3.1	Pendapatan Hibah	757.427.899.800,00	779.850.307.643,00	22.422.407.843,00	102,96	
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	173.838.000.000,00	191.087.575.517,00	17.249.575.517,00	109,92	
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	225.529.294.000,00	222.481.485.326,00	(3.047.808.674,00)	98,65	
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	46.363.857.000,00	46.363.857.000,00	0,00	100,00	
1.3.7	Dana Desa	24.740.800.000,00	32.961.441.000,00	8.220.641.000,00	133,23	
<b>2</b>	<b>BELANJA</b>	286.955.948.800,00	286.955.948.800,00	0,00	100,00	
2.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	3.566.393.467.051,00	3.283.321.137.886,20	(283.072.329.164,80)	92,06	
2.1.1	Belanja Pegawai	1.869.867.076.655,00	1.761.479.421.400,00	(108.387.655.255,00)	94,20	
2.1.3	Belanja Subsidi	1.290.256.945.480,00	1.193.017.590.225,00	(97.239.355.255,00)	92,46	
2.1.4	Belanja Hibah	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	100,00	
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	61.276.850.000,00	58.596.950.000,00	(2.679.900.000,00)	95,63	
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	9.056.100.000,00	5.884.050.000,00	(3.172.050.000,00)	64,97	
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	22.943.846.000,00	22.943.846.000,00	0,00	100,00	
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	480.636.985.175,00	480.636.985.175,00	0,00	100,00	
2.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	5.296.350.000,00	0,00	(5.296.350.000,00)	0,00	
2.2.1	Belanja Pegawai	1.696.526.390.396,00	1.521.841.716.486,20	(174.684.673.909,80)	89,70	
2.2.1.1	Belanja Pegawai	213.069.155.800,00	201.926.667.932,00	(11.142.487.868,00)	94,77	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	697.236.927.449,00	656.593.850.548,00	(40.643.076.901,00)	94,17	
2.2.3	Belanja Modal	786.220.307.147,00	663.321.198.006,20	(122.899.109.140,80)	84,37	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(277.389.117.633,00)	(523.171.575,61)	276.865.946.057,39	0,19	
3	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>					
3.1	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	302.164.117.633,00	302.164.117.632,93	(0,07)	100,00	
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	302.164.117.633,00	302.164.117.632,93	(0,07)	100,00	
3.2	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	24.775.000.000,00	20.775.000.000,00	(4.000.000.000,00)	83,85	
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	24.775.000.000,00	20.775.000.000,00	(4.000.000.000,00)	83,85	
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	277.389.117.633,00	281.389.117.632,93	3.999.999.999,93	101,44	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	0,00	280.865.946.057,32	280.865.946.057,32	0,00	

BUPATI CILACAP,



TATTO SUWARTO PAMUJI



**PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP**  
**PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

TAHUN ANGGARAN 2019

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
1	2	3	4	5	6
5	<b>BELANJA</b>	1.128.465.560.200,00	1.080.558.478.744,20	(47.907.081.455,80)	95,75
5.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	849.806.151.633,00	794.538.762.405,00	(55.267.389.228,00)	93,50
5.1.00.00.1	<b>Belanja Pegawai</b>	849.806.151.633,00	794.538.762.405,00	(55.267.389.228,00)	93,50
5.1.00.00.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	514.675.415.222,00	496.590.531.506,00	(18.084.883.716,00)	96,49
5.1.00.00.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	401.594.702.000,00	391.839.792.593,00	(9.754.909.407,00)	97,57
5.1.00.00.1.01.02	Tunjangan Keluarga	37.166.310.000,00	35.290.409.447,00	(1.875.900.553,00)	94,95
5.1.00.00.1.01.03	Tunjangan Jabatan	225.941.000,00	214.049.000,00	(11.892.000,00)	94,74
5.1.00.00.1.01.04	Tunjangan Fungsional	36.920.800.000,00	34.013.186.000,00	(2.907.614.000,00)	92,12
5.1.00.00.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	2.554.480.000,00	2.002.180.000,00	(552.300.000,00)	78,38
5.1.00.00.1.01.06	Tunjangan Beras	17.032.482.200,00	15.830.128.416,00	(1.202.363.784,00)	92,94
5.1.00.00.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	4.446.236.000,00	3.218.324.009,00	(1.227.911.991,00)	72,38
5.1.00.00.1.01.08	Pembulatan Gaji	10.274.022,00	5.198.014,00	(5.076.008,00)	50,59
5.1.00.00.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	11.395.540.000,00	10.963.891.035,00	(431.648.965,00)	96,21
5.1.00.00.1.01.21	Iuran Asuransi Tenaga Kerja	3.328.640.000,00	3.213.372.992,00	(115.267.008,00)	96,54
5.1.00.00.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	17.595.850.000,00	15.087.955.698,00	(2.507.894.302,00)	85,75
5.1.00.00.1.02.06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya	17.595.850.000,00	15.087.955.698,00	(2.507.894.302,00)	85,75
5.1.00.00.1.07	Tambahan Penghasilan Guru PNSD	317.534.886.411,00	282.860.275.201,00	(34.674.611.210,00)	89,08
5.1.00.00.1.07.01	Tambahan Penghasilan Guru PNSD	1.455.137.500,00	1.138.100.510,00	(317.036.990,00)	78,21
5.1.00.00.1.07.02	Tunjangan Profesi Guru PNSD	316.079.748.911,00	281.722.174.691,00	(34.357.574.220,00)	89,13
5.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	278.659.408.567,00	286.019.716.339,20	7.360.307.772,20	102,64
5.2.00	<b>Non Program</b>	0,00	2.356.752.992,00	2.356.752.992,00	0,00
5.2.00.00	<b>Non Kegiatan</b>	0,00	2.356.752.992,00	2.356.752.992,00	0,00
5.2.00.00.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	2.356.752.992,00	2.356.752.992,00	0,00
5.2.00.00.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	0,00	2.037.952.992,00	2.037.952.992,00	0,00



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
1	2	3	4	5	6
					7
5.2.20.03.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	525.750,00	504.000,00	(21.750,00)	95,86
5.2.20.03.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	435.750,00	414.000,00	(21.750,00)	95,01
5.2.20.03.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	90.000,00	90.000,00	0,00	100,00
5.2.20.03.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.200.000,00	4.100.000,00	(3.100.000,00)	56,94
5.2.20.03.2.03.19	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.200.000,00	4.100.000,00	(3.100.000,00)	56,94
5.2.20.03.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.054.000,00	6.860.000,00	(1.194.000,00)	85,18
5.2.20.03.2.06.01	Belanja Cetak	7.904.000,00	6.710.000,00	(1.194.000,00)	84,89
5.2.20.03.2.06.02	Belanja Penggandaan	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00
5.2.20.03.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00
5.2.20.03.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00
5.2.20.04	<b>Sumpah/Tariff PNS</b>	39.999.900,00	22.749.000,00	(17.250.900,00)	56,87
5.2.20.04.1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.828.000,00	3.500.000,00	(1.328.000,00)	72,49
5.2.20.04.1.03	Uang Lembur	4.828.000,00	3.500.000,00	(1.328.000,00)	72,49
5.2.20.04.1.03.01	Uang Lembur PNS	4.828.000,00	3.500.000,00	(1.328.000,00)	72,49
5.2.20.04.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	35.171.900,00	19.249.000,00	(15.922.900,00)	54,73
5.2.20.04.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	468.500,00	370.000,00	(98.500,00)	78,98
5.2.20.04.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	378.500,00	280.000,00	(98.500,00)	73,98
5.2.20.04.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	90.000,00	90.000,00	0,00	100,00
5.2.20.04.2.03	Belanja Jasa Kantor	15.300.000,00	5.350.000,00	(9.950.000,00)	34,97
5.2.20.04.2.03.19	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	15.300.000,00	5.350.000,00	(9.950.000,00)	34,97
5.2.20.04.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.403.400,00	7.529.000,00	(1.874.400,00)	80,07
5.2.20.04.2.06.01	Belanja Cetak	9.176.000,00	7.304.000,00	(1.872.000,00)	79,60
5.2.20.04.2.06.02	Belanja Penggandaan	227.400,00	225.000,00	(2.400,00)	98,94
5.2.20.04.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.000.000,00	6.000.000,00	(4.000.000,00)	60,00
5.2.20.04.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.000.000,00	6.000.000,00	(4.000.000,00)	60,00
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(25.562.470.666,00)	(17.428.341.409,00)	8.134.129.257,00	68,18

BUPATI CILACAP,

  
TATTD SUPARTO PAMUJI